

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA URUNG PURBA  
KECAMATAN PURBA KABUPATEN  
SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
JAYA GOVINDO PURBA  
198520083**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/4/24

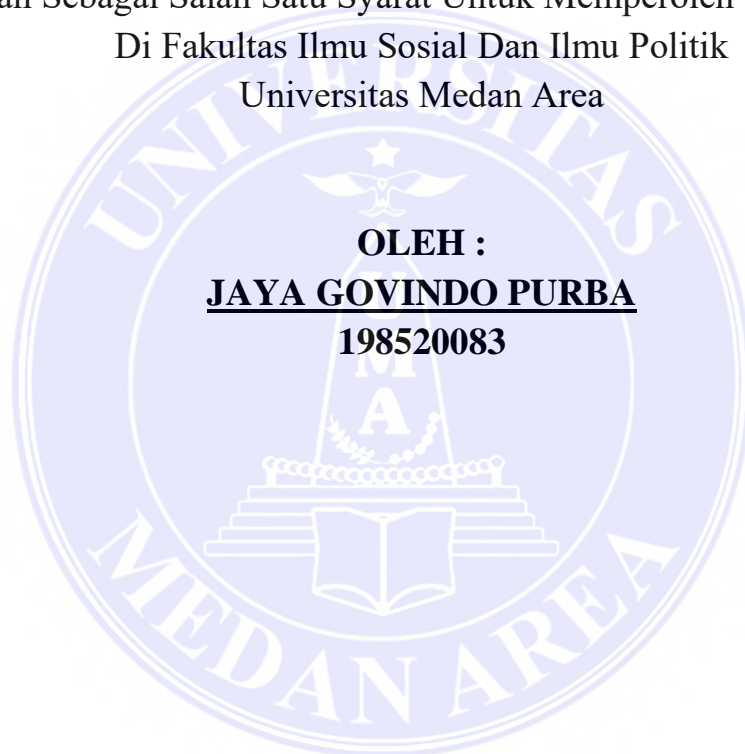
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/4/24

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA URUNG PURBA  
KECAMATAN PURBA KABUPATEN  
SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**OLEH :**  
**JAYA GOVINDO PURBA**  
**198520083**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/4/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/4/24

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun  
Nama : Jaya Govindo Purba  
NPM : 1985200683  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jurusan : Administrasi Publik

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si

Pembimbing II



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Walid Musthafa S, S.sos, M.IP

Ka Prodi Administrasi Publik



Dr. Des Andra Muda, M.AP

Tanggal Lulus: 30 Januari 2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademi yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 Januari 2024



Jaya Govindo Purba

198520083

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaya Govindo Purba

NPM : 198520003

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 30 Januari 2024

Yang menyatakan



(Jaya Govindo Purba)



## ABSTRAK

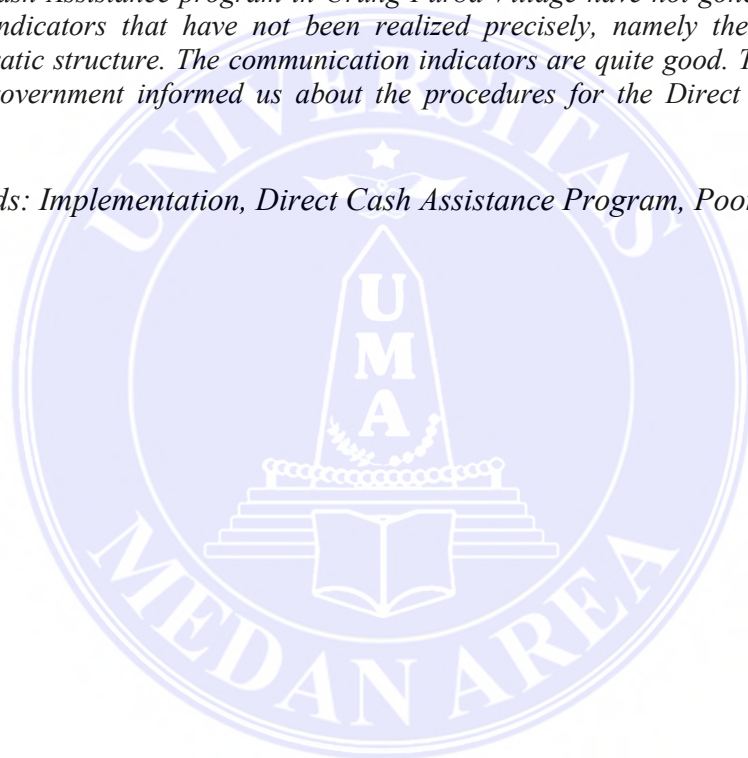
Pada maret 2020 pandemi covid-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia, pemerintah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan implementasi program Bantuan Langsung Tunai yang telah dilakukan di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian program Bantuan Langsung Tunai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (Agustino 2012: 149) memiliki 4 Indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian pengimplementasian program Bantuan Langsung Tunai di Desa Urung Purba belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan adanya indikator yang belum dapat direalisasikan secara tepat yaitu disposisi dan struktur birokrasi. Indikator komunikasi sudah terbilang cukup baik pemerintah desa Urung Purba menginformasikan bahwa tentang tata cara dalam program Bantuan Langsung Tunai, indikator disposisi sudah dapat terbilang baik karena perangkat desa sudah sabar dan ramah dalam menghadapi masyarakatnya, indikator sumber daya sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan program pengimplementasiannya, indikator struktur birokrasi telah berjalan dengan baik penyaluran BLT di Desa Urung Purba telah memiliki standar operasional yang ditetapkan. Faktor penghambat indikator komunikasi, kurang maksimalnya sosialisasi Bantuan Langsung Tunai dan indikator struktur birokrasi pembagian bantuan yang tidak merata serta sistem pendataan masih oligarki atau sistem kekeluargaan.

Kata kunci : Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai, Masyarakat miskin

### ***Abstrack***

*In March 2020, the COVID-19 pandemic was officially declared to have entered Indonesia, the government designed several social protection guarantee programs. One of them is Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD). The research aims to describe the implementation of the Direct Cash Assistance program which has been carried out in Urung Purba Village, Purba District, Simalungun Regency, and to determine the inhibiting factors in implementing the Direct Cash Assistance program. This study uses a qualitative method. The theory used is the theory of policy implementation according to Edward III (Agustino 2012: 149) has 4 indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The results of the research on the implementation of the Direct Cash Assistance program in Urung Purba Village have not gone completely well due to indicators that have not been realized precisely, namely the disposition and bureaucratic structure. The communication indicators are quite good. The Urung Purba village government informed us about the procedures for the Direct Cash Assistance program.*

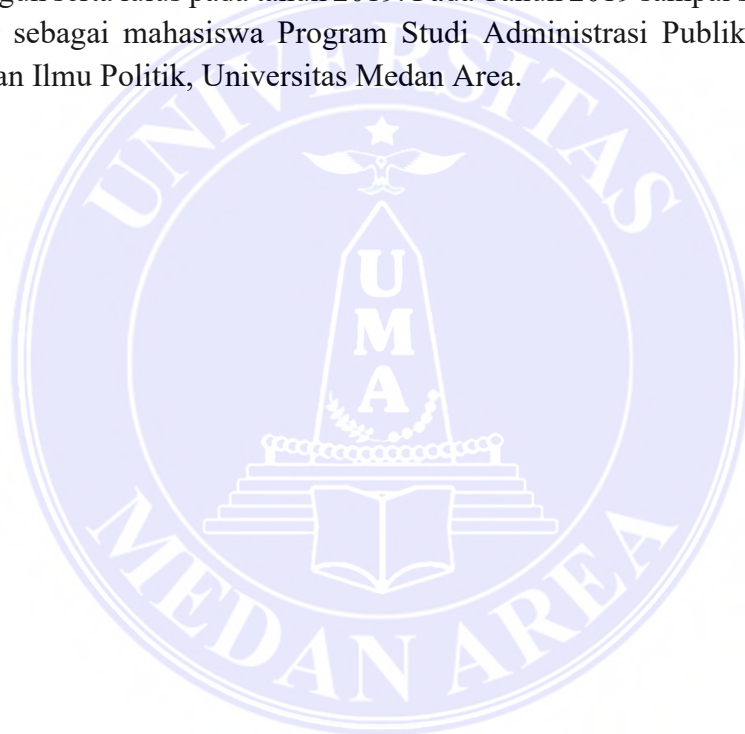
*Keywords: Implementation, Direct Cash Assistance Program, Poor Communities*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Jaya Govindo Purba, dilahirkan di Desa Gajapokki Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dan pada tanggal 3 Februari 2001 dari ayah Rahmat Purba dan ibu Eramalince Lingga, penulis merupakan putra kedua dari tiga bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 091356, Gajapokki Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya Penulis bersekolah di SMP Negeri 2 Purba, lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Silimakuta Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun serta lulus pada tahun 2019. Pada Tahun 2019 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan dari penyusunan proposal yang berjudul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. DR. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Walid Musthafa S, S.sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si selaku Dosen Pembimbing I .
5. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol sebagai Pembimbing II.
6. Ibu Hadiyanti Arini, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris yang telah membimbing Penulis dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan

ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Rahmat Purba dan Ibu Erama Lince Lingga yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberi dukungan, motivasi dan Doa serta materi yang selalu diusahakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada abang dan adik saya Andrison Purba dan Devi Amelsa Purba yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan dan Doa kepada peneliti demi selesainya Skripsi ini.
11. Bapak Halomoan Sinaga Selaku Kepala Desa Urung Purba yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
12. Sekretaris Desa Urung Purba yang berkenan membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penelitian ini.
13. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik yang selalu memberikan semangat dan doanya.

Medan, 30 Januari 2024

Penulis

(Jaya Govindo Purba)

198520083

## DAFTAR ISI

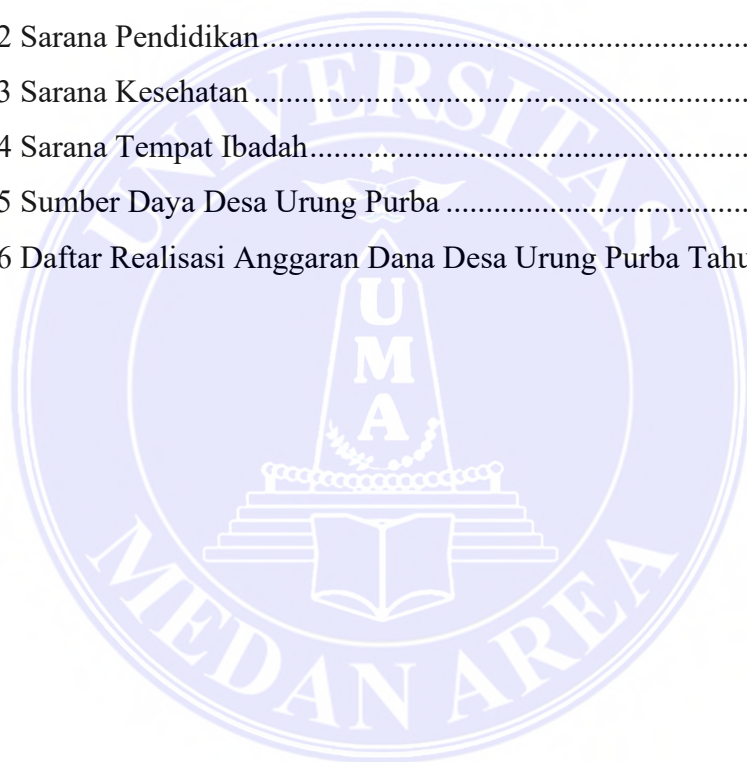
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<i>Abstrack</i> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1.Implementasi .....	12
2.2.Kemiskinan.....	14
2.2.1.Faktor Faktor Kemiskinan .....	19
2.2.2.Bentuk Bentuk Kemiskinan .....	20
2.3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) .....	21
2.3.1.Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai .....	24
2.3.2 Kriteria Penerima Program Bantuan Langsung Tunai.....	24
2.4.Penelitian Terdahulu .....	25
2.5.Kerangka Berpikir .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	29
3.2.Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
3.3.Sumber Data .....	31
3.4.Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.5.Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	38
4.1.1. Gambaran Umum Desa Urung Purba .....	38
4.1.2.Sarana dan Prasarana .....	41
4.1.3.VISI MISI PEMERINTAH DESA URUNG PURBA.....	43
4.1.4. Struktur Pemerintahan Desa Urung Purba.....	44
4.2.Program BLT DD.....	50
4.3.Pembahasan.....	59
4.3.1.Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.....	59

4.3.2.Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Urung Purba Kecamatan Urung Purba Kabupaten Simalungun...	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
5.1.Kesimpulan.....	75
5.2.Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin 2017-2020 Kabupaten Simalungun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional .....	6
Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020-2022 di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	30
Tabel 3.2 Nama-nama informan penelitian.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Urung Purba .....	41
Tabel 4.2 Sarana Pendidikan.....	42
Tabel 4.3 Sarana Kesehatan .....	42
Tabel 4.4 Sarana Tempat Ibadah.....	43
Tabel 4.5 Sumber Daya Desa Urung Purba .....	67
Tabel 4.6 Daftar Realisasi Anggaran Dana Desa Urung Purba Tahun 2022 .....	71





## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	28
Bagan 4.1 Struktur Desa Urung Purba.....	44
Bagan 4.2 Struktur Organisasi BLT Kabupaten Simalungun .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara .....	83
Lampiran II Dokumentasi Lapangan .....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada maret 2020 pandemi Covid-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia, sejak saat itu penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak Covid-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah Covid-19.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) termasuk dalam skala prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2021 dan merupakan salah satu program dalam skema pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan dengan diperpanjang nya masa program BLT Dana Desa dapat meminimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa yang diakibatkan oleh kondisi pandemi Covid-19.

Pengertian Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tahun 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD) yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan di atas jelas bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang diperuntukkan bagi desa.

BLT dana desa merupakan salah satu produk hukum yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanganan dampak dari pandemi Covid-19 yang cukup membuat ketidakstabilan yang cukup merepotkan dan mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan. Pemberian BLT dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian juga memperbaiki perputaran roda perekonomian yang kurang stabil karena wabah Covid-19. BLT dana desa dimaksudkan sebagai jaringan pengaman sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa pandemi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman tersebut memiliki tujuan nasional utama ialah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Indikator yang menandakan suatu Negara memiliki rakyat yang sejahtera adalah memiliki rakyat yang cerdas, adanya suatu keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bukan hanya kesejahteraan materi yang

menjadi indikator sejahteranya Negara namun kualitas kesehatan penduduk pun merupakan tanggungjawab yang wajib di perhatikan oleh pemerintah (Trifena, 2020:3).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam merespons dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pandemi ini telah menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Dalam rangka mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah BLT Dana Desa.

Pemberian BLT Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan yang terdampak pandemi. Dana ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan di desa-desa untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Pemberian BLT Dana Desa diharapkan juga dapat memperbaiki perputaran roda perekonomian di tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat membantu memulihkan perekonomian nasional yang terpuak oleh pandemi.

Referensi undang-undang yang mendukung inisiatif BLT Dana Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dana Desa. Melalui undang-undang dan regulasi tersebut, pemerintah Indonesia memberikan dasar hukum bagi alokasi dana desa, termasuk BLT, sebagai bagian dari upaya penanganan dampak pandemi Covid-19.



Pemberian BLT Dana Desa di Indonesia adalah contoh konkret dari bagaimana negara dapat menggunakan instrumen kebijakan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak krisis ekonomi seperti pandemi. Selain itu, upaya ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap rakyat dalam kondisi darurat seperti pandemi.

Dengan adanya BLT Dana Desa, pemerintah Indonesia berupaya memitigasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19, sambil memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pedesaan yang membutuhkannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah ini penting dalam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dalam situasi sulit seperti pandemi ini.

Upaya peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup layak serta mengembangkan dirinya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan yaitu membuat berbagai model program maupun pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

Pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberantas tingkat kemiskinan maka pemerintah dalam hal ini untuk sampai pada tujuan tersebut dibutuhkan kerja keras pemerintah untuk melayani masyarakat kurang mampu, maka dari itu pemerintah dalam melakukan program kerja untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat miskin sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang telah

diubah dengan peraturan Presiden No. 96 tahun 2015 dan keputusan Menteri Sosial RI 21/HUK/2017 tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat Subsidi beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang ataupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Raka, 2020:2). Bantuan Sosial selanjutnya disebut (BANSOS) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial memuat arti politik dan memuat kepentingan politik dalam arti luas.

Pelaksanaan BLT Dana Desa ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020, tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk mengelola bantuan langsung tunai dana desa tersebut pemerintah desa diharapkan melaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) 2021, 54% penduduk di Kabupaten Simalungun bermata pencaharian bercocok tanam. Pekerjaan ini belum dapat menyejahterakan rakyat karena penghasilan dari bercocok tanam belum mampu

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Mahalnya harga-harga bahan baku untuk bercocok tanam seperti: pupuk, bibit dan lain sebagainya menyebabkan masyarakat semakin tidak mampu untuk terus bercocok tanam. Berikut ini merupakan jumlah kemiskinan di Kabupaten Simalungun tercatat dari tahun 2017-2021 berdasarkan data BPS SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin 2017-2020 Kabupaten Simalungun berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin(Jiwa)
1	2017	91,35
2	2018	80,293
3	2019	76,33
4	2020	73,64
5	2021	76,99

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun, 2021*

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS Kabupaten Simalungun jumlah kemiskinan di Kabupaten Simalungun dari tahun 2017-2021 terlihat jumlah kemiskinan di Kabupaten Simalungun semakin menurun tetapi masih banyak berkisar 76,99 jiwa pada tahun 2021. Penyebab kemiskinan adalah karena minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Tidak hanya itu, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengurangi dan mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia serta memupuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat miskin.

Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal baru. Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan.

Hal ini sejalan dengan teori *Welfare State* merujuk dari (Alfitri, 2012: 4-6), konsep *Welfare State* dalam *Encyclopedia Britannica* yakni terkait tanggung jawab negara sebagai garda terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya.

**Tabel 1.2 Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020-2022 di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun**

No	Jumlah	Tahun
1	103 orang	2020
2	94 orang	2021
3	87 orang	2022

Sumber; diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 1.2 jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa diatas permasalahan kebijakan BLT yang terjadi menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang muncul dari pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah.

Desa Urung Purba Kabupaten Simalungun merupakan salah satu desa di Sumatera Utara yang masyarakatnya masih banyak yang kurang mampu, dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang akan diterima, dan dana yang di dapatkan masyarakat sebesar Rp.300.000/ kepala rumah tangga. Prinsip bantuan ini adalah untuk melengkapi serangkaian program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan

pemerintah seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), dalam Pasal 2 menyebutkan tujuan dari Program Keluarga Harapan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk dan Jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat, bantuan sembako, dan diskon listrik bedanya skema BLT Dana Desa ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menentukan sendiri calon penerima bantuan secara partisipatif melalui musyawarah Desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dilatarbelakangi dari adanya problem yang paling utama dalam masyarakat miskin merupakan rendahnya kualitas SDM dan kondisi masyarakat di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera masih banyak keluarga kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan ibu hamil dan kualitas gizi pada bayi dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Akan tetapi dari pengamatan yang dilakukan peneliti adanya kejanggalan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai ini, dimana salah satu penerima bantuan BLT merupakan masyarakat yang tergolong mampu dan adanya masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak dapat menerima Bantuan Langsung Tunai ini. Banyak masyarakat yang berkeluh kesah dalam hal bantuan ini ada beberapa masyarakat mengalami kemacetan dana bantuan dari BLT ini sehingga merasa dirugikan dan kurangnya kepuasan dalam



pelayanan petugas pendamping BLT, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara mendatangi kantor kepala desa untuk menanyakan kepastian mengenai proses pencairan dana BLT Dana Desa.

Kajian-kajian sebelumnya terkait dengan implementasi kebijakan oleh Nafida arumdani tahun 2020 Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitiannya penanggulangan dampak Covid-19 khususnya dalam hal ekonomi, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memberikan bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa untuk disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat efektivitasnya melalui ketepatan waktu, dapat disimpulkan Desa Mojoruntut sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan mekanisme, sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan. Dapat disimpulkan masih adanya sikap nepotisme meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan Adanya BLTDD ini.

BLT menjadi bagian penting dalam jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa dalam pendistribusian bantuan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dimulai dari pendataan dari yang tidak memiliki penduduk miskin hingga Dana Desa tidak mencukupi karena banyaknya warga yang terdampak, kecemburuan sosial yang timbul, kepercayaan kepada kepala desa, hingga kepala desa yang tidak

mau menyalurkan Dana Desa. Permasalahan timbul akibat dari kurangnya pengetahuan baik kepala desa, aparat desa, maupun masyarakat desa itu sendiri.

Tentunya dalam pelaksanaan program, masalah tidak semua atas kelalaian petugas, pasti memiliki hambatan yang dihadapi oleh petugas baik itu dari segi penyaluran dana bantuan maupun kendala lainnya, yang memiliki pengaruh di dalam implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilokasi tersebut.

Dari persoalan tersebut, penulis ingin mendeskripsikan, mengamati dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pelaksanaan “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun”’.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin Di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Dari Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang adanya implementasi program bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin Desa Urung Purba kabupaten Simalungun. Seluruh rangkaian kegiatan dan penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai penguasaan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti program administrasi publik pada universitas medan area.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menginformasikan terhadap Aparat Desa Urung Purba untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terkait mengurangi tingkat kemiskinan di desa Urung Purba kecamatan purba Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat Urung Purba dalam menyempurnakan pelayanan implementasi Bantuan Langsung Tunai(BLT) serta sebagai bahan masukan dalam meningkatkan implementasi program bantuan langsung tunai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Implementasi

Implementasi adalah tahapan pelaksanaan dari suatu proses kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Riple dan Franklin (Handoyo, 2012:94) implementasi merupakan dapat terjadi sesudah disahkan oleh Undang-Undang yang dapat memberikan pengaruh atau otoritas terhadap program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) maupun sejenis pengeluaran yang nyata (*tangible output*), yang artinya suatu implementasi atau kebijakan yang umum dibuat berlandaskan pada peraturan dan keputusan yang diatur oleh Undang-Undang.

Implementasi adalah suatu proses yang bergerak maju, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, sebagai permasalahan yang pada akhirnya akan menerima suatu masalah yang sesuai dengan tujuan atau target kebijakan itu sendiri (Agustino, 2012: 2).

Ripley dan Franklin dalam (Rachman, 2018: 10-27) menyatakan bahwa implementasi ialah apa yang terjadi sesudah undang-undang ditetapkan yang menyampaikan otoritas acara, kebijakan, laba, keuntungan/*benefit* maupun suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), yang artinya suatu implementasi atau kebijakan yang umum dibuat berlandaskan pada peraturan dan keputusan yang diatur oleh Undang-Undang.

Daniel Maszmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi ialah sebagai berikut:

“aplikasi kebijakan keputusan dasar, umumnya pada bentuk undang-undangan, tetapi bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang krusial atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi problem yang ingin diatasi, menjelaskan secara tegas tujuan yang ingin dicapai, serta aneka macam cara buat menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”(Suparno, 2017: 56).

Dalam buku George Edward III (Agustino, 2012: 151) mengatakan terdapat empat variabel atau secara pribadi juga tidak eksklusif bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain mencakup variabel atau faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, yaitu :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikasi”. Komunikasi sangat memilah keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, komunikasi juga menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Implementasi yang efektif baru akan tercapai jika para penghasil keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan, Pengetahuan itu baru dapat berjalan ketika komunikasi sudah berlangsung dengan baik.

#### 2. Sumber daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, maka kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen. Implementasi tidak akan terlaksana efektif jika terjadi sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang kurang memadai untuk mengimplementasikan nya.



### 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau (*Standard Operating Produces* atau *SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang begitu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

## 2.2. Kemiskinan

Kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 2016 adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan garis kemiskinan yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM), dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang dihasilkan dari nilai

kebutuhan minimum makanan yang di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat (Nurwati, 2008:6-7). Kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak kemiskinan sangatlah berbeda-beda. Menurut Amarta Sen (1987) dalam (Haughton dan Shahidur, 2012:11) kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan dianggap sebagai sebuah fenomena yang sangat sering terjadi.

Kemiskinan selain berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak dianggap miskin bisa saja sewaktu waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian, (Haughton dan Shahidur, 2012:3). Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi ,pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Teori Nurkse (Kuncoro, 1997: 107) kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan latar sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah, pendapatan

yang rendah akan mengakibatkan investasi dan tabungan menurun jika pendapatan terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal.

Penetapan pengukuran dan kriteria kemiskinan secara nasional sangat sulit. Masih diperlukan kajian yang dapat mengakomodasikan permasalahan dunia yang kompleks baik dari segala ekonomi, budaya, sosial, psikologik, dan geografik yang sangat bervariasi di Indonesia. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (*modernisation pradigm*) yang dimotori oleh bank dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik (*ortodox neoclassical economics*) dan model yang berpusat pada produksi (*production-centred model*). Sejak pendapatan nasional Bruto (*Gross National Bruto*) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut berbicara masalah kemiskinan satu negara (Kuncoro, 1997: 107).

Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh *perspektif income property* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator garis kemiskinan di bawah kepemimpinan ekonom asal pakistan, Mahbub UI Haq, pada tahun 1990-an UNDP memperkenalkan Pendekatan *Human Development* yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang artinya mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*) ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dibandingkan dengan

pendekatan yang dipakai Bank Dunia, pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif karena bukan hanya mencakup dimensi ekonomi pendapatan (Suryawati, 2004: 4-5).

Terdapat 5 karakteristik yang dikemukakan oleh (Supriatna, 1997:82) terkait penduduk miskin, Kelima karakteristik miskin tersebut adalah:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri;
- 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri;
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah;
- 4) Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas ; dan
- 5) Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Booth dan Me Cawley dalam (Moeljarto, 1993:13-54) menyatakan bahwa:

“di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa bahkan sangat dirugikan. Pemecahan masalah ini perlu kebijakan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya lebih dulu. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah”.

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng) dan pengangguran. Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema

yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius terutama untuk generasi berikutnya.

Pada umumnya Suryawati (2004: 5), mengatakan penduduk yang tergolong miskin adalah golongan residual, yakni kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonstrasikan secara khusus, seperti melalui IDT (*Indonesia Digital Tribe*) sebuah program yang bertujuan untuk mempersiapkan pemuda Indonesia untuk berkontribusi dan berkarya menjadi talenta digital muda Indonesia, namun secara umum sudah melalui PKT (Padat Karya Tunai) yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus menurunkan angka *stunting* (gizi buruk), Program Bimas (Bimbingan Massal) adalah program untuk meningkatkan produksi pangan, Program peningkatan pendapatan Petani dan Nelayan, Normal Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), Koperasi Unit Desa (KUD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa, dan sebagainya.

Golongan ini termasuk sulit disentuh, karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi. Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan dasar manusia, dan perlindungan hukum atau perundang-undangan yang tidak kurang memihak mereka.



### 2.2.1. Faktor Faktor Kemiskinan

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Yogya (2021:8) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk, jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan manusia berkembang lebih cepat jika dibandingkan dengan produksi hasil pertanian yang menyebabkan penduduk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dimana dapat menyebabkan kemiskinan meningkat,
2. Pengangguran, pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan penduduk yang menganggur pasti tidak memiliki penghasilan sehingga, penduduk yang menganggur tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri yang dimana dapat dikatakan sebagai penduduk miskin,
3. Upah, upah berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan dengan meningkatnya rata-rata upah dalam suatu daerah dapat mengurangi jumlah kemiskinan dalam daerah tersebut,
4. Pendidikan, Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan pendidikan merupakan aspek yang penting yang perlu pemerintah lakukan dalam mengurangi kemiskinan, semakin baik pendidikan dalam suatu daerah maka jumlah kemiskinan juga dapat semakin rendah,
5. Kesehatan, kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan kesehatan dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan mengurangi tabungan dalam rumah tangga, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup penduduk yang dimana dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah.

Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa faktor kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki dampak yang kuat terhadap kemiskinan. Pada rumah tangga, tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh kepala rumah tangga merupakan hal sangat vital. Dikarenakan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghasilan dan kepala rumah tangga merupakan sumber penghasilan utama dalam rumah tangga, sehingga pendidikan yang telah ditempuh oleh kepala rumah tangga menjadi faktor yang penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga.

### 2.2.2. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Dimensi kemiskinan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan (Chambers, 1983:149). Konsep kemiskinan memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Kemiskinan memiliki empat jenis menurut Suryawati (2004:122) yaitu:

- a. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin,
- b. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal,
- c. Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain,
- d. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang

kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kemiskinan yaitu orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan orang-orang yang kurang mampu sehingga kurang mencukupi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan pendidikan.

### **2.3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Realisasi Bantuan langsung tunai adalah dari pemerintah akibat dicabutnya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dan dialihkan kepada masyarakat miskin agar di Indonesia berkurang, dengan adanya BLT selama ini menggunakan cara manual yang dapat membantu dalam mengambil suatu keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Program aplikasi ini telah berjalan dengan baik dan dapat membantu badan pusat statistik dalam proses penerimaan BLT (Sopha, 2018: 2).

Pemerintahan Presiden SBY mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bersyarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia kembali naik, pada 2008 pemerintah kembali melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti pada 2005. Langkah ini ditempuh sebagai upaya pengentasan kemiskinan (Iping, 2020:512-526).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program pemerintahan SBY untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebijakan ini merupakan program subsidi pemerintah setelah kenaikan harga bahan bakar minyak tahun lalu. Kenaikan BBM

diambil sebagai bentuk penyelamatan anggaran negara akibat naiknya harga minyak dunia saat itu (Maenanda 2014 dalam Iping, 2020:2).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu bentuk bantuan dari pemerintahan sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini berimbas kepada kehidupan masyarakat luas termasuk kalangan masyarakat miskin. Masyarakat mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga BBM, sehingga kelompok masyarakat ini mendapatkan bantuan BLT (Sopnan, dkk., 2018:2). Program BLT ini dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup yang akan terjadi jika harga BBM dinaikkan. Besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin karena kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM (Hasbi, 2008:17-19).

Soal BLT sendiri sebenarnya sudah sering dibahas melalui media massa dimana program ini dinilai kurang efektif oleh banyak pihak, jadi sempat timbul pro dan kontra. Ada yang menilai bahwa pemberian uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 3 bulan sekali itu tidak membantu banyak.

Program bantuan langsung tunai ini memiliki prosedur tertentu antara lain yang pertama itu harus selesai laporan realisasi pada penerimaan sebelumnya, setelah itu diajukan berkas persyaratan yang diminta ke pemdes, kemudian pemdes yang mengajukan ke pusat, setelah dana cair ke pemerintah desa dilakukan pencairan dengan tahapan SPP diadakan akan dicairkan ke dana tersebut, setelah dana dicairkan diadakan penerimaan BLT. Adapun persyaratan bagi masyarakat penerima BLT yaitu hanya dibutuhkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).



Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Alasan hukum atau konsideran menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut.

Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya Covid-19. Mengacu pada peraturan di atas bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. Dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa dana desa tidak melalui



APBA. Pasal 1 Angka 28 Permendes tegas mendefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.

### **2.3.1 Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial di tingkat pemerintahan dan Desa ada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang berasal dari anggaran Dana Desa untuk diberikan kepada masyarakat miskin di Desa. Maksud dan Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai yaitu untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **2.3.2 Kriteria Penerima Program Bantuan Langsung Tunai**

Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai tidak semua masyarakat dapat menerimanya, adapun kriteria untuk penerima yaitu sebagai berikut;

1. Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian;
2. Keluarga miskin yang belum terdata;
3. Keluarga miskin yang rentan sakit menahun/kronis.

Menurut *website* Kemensos, terdapat syarat-syarat dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni:

1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fakir miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4. Pencairan tahap pertama harus melampirkan APBDDESA dan peraturan Kepala Desa tentang penerima KPM.

## 2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Dan Nama Penelitian	Hasil Penelitian/ Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	“Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo” Nafida Arumdani tahun 2020	Dalam penelitiannya metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, mengungkapkan keadaan Kabupaten Desa Mojoruntut sendiri bisa dikatakan cukup baik jika dilihat dari infrastrukturnya, kondisi jalan yang sudah diaspal sehingga memudahkan akses keluar masuk desa, kantor kepala desa juga telah direnovasi dengan baik agar dapat menyajikan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat terdapat 5 dusun di Desa Mojoruntut yaitu dusun Simorow, Kesibukan, Buntut, Jabon dan Biting. Kondisi tempat tinggal masyarakat sudah bagus dan layak untuk dihuni dan pendapatan yang diperoleh masyarakatnya cukup tinggi sehingga tingkat kemiskinan di desa Mojoruntut juga rendah. Mata pencaharian di desa ini pada umumnya meliputi buruh pabrik, petani, pedagang, PNS, dan pengusaha.	Perbedaan penelitian terletak pada awalan judul, perbedaan lokasi penelitian dan waktu penelitian. Nafida Arumdani membahas tentang Efektifitas Bantuan Langsung Tunai sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai.
2	“Hasil Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Gianyar” Winarti Wayan tahun 2020	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana hasil penelitian ini. Kebijakan Dana Bansos sudah cukup baik dan cukup efektif dalam mencapai tujuannya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin. Tetapi menurut penulis kebijakan Bansos di Kabupaten Gianyar belum cukup efektif, dikarenakan masih adanya masyarakat yang mendapatkan program Bansos tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.	Perbedaan penelitian terletak pada awalan judul, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Winarti Wayan memilih lokasi di Kabupaten Gianyar
3	“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau” Muhammad Hafiz tahun 2021	Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Riau Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik, masih banyak Bantuan Sosial Tunai yang belum tepat sasaran hal ini disebabkan karena kurangnya informasi antara pihak terkait yang akan menimbulkan informasi yang kurang jelas tersampaikan kepada masyarakat, hal ini akan menyebabkan masyarakat kurang memahami mengenai Program Bantuan Langsung Tunai.	Perbedaan penelitian terletak pada perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan penelitian sekarang. Muhammad Hafiz memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

4	<p>“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Pada Kecamatan Medan Belawan)” Muhammad Naufal Ardian Tahun 2021</p>	<p>Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan belawan dalam perspektif ekonomi politik telah berjalan dengan baik. Seluruh rangkaian atau proses kegiatan mulai dari sosialisasi awal refleksi kemiskinan, pelaksanaan program, monitoring program, semuanya berjalan cukup baik Keberhasilan kebijakan, pendampingan, kemandirian bagi masyarakat miskin. Kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini adalah masih adanya masyarakat miskin yang sebagian besar adalah buruh nelayan tradisional yang masih belum menerima manfaat program-program bantuan dari pemerintah. Sehingga menyebabkan sebagian anak-anak mereka harus putus sekolah untuk bekerja membantu kedua orangtuanya</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan waktu penelitian. Muhammad Naufal Ardian membahas tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan Belawan dan berfokus Dalam Perspektif Ekonomi Politik sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin di desa Urung Purba</p>
5	<p>“Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah” Riski Ananda Tahun 2021</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin barat sudah berjalan dengan efektif bahwa indikator efektivitas menurut duncan semuanya sudah mulai terpenuhi. Hanya saja terjadi sedikit kendala dalam pendataan karena sifat bantuan yang regulasinya dikeluarkan secara mendadak dan harus terpenuhi dengan waktu yang cepat.</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada Lokasi penelitian, waktu penelitian dan Riski Ananda membahas tentang Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin</p>

Sumber; Diolah Peneliti, 2023

## 2.5. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2013: 60), mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai atau yang merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian

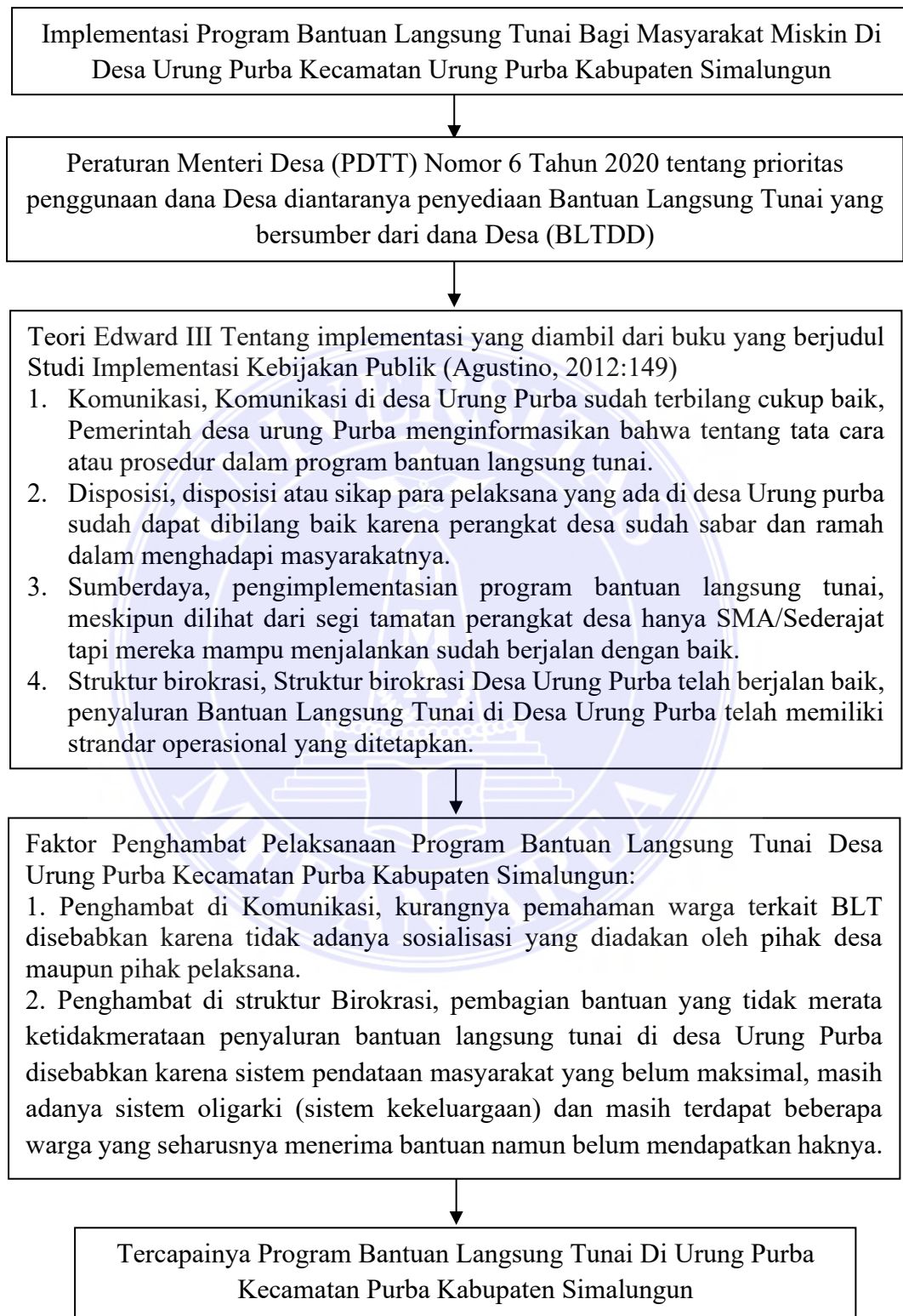
ini menggunakan teori Edward III (Agustino, 2012:149) terdapat 4 faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain:

1. Komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikasi”. Komunikasi sangat memilih keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, komunikasi juga menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Implementasi yang efektif baru akan tercapai jika para penghasil keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan, Pengetahuan itu baru dapat berjalan ketika komunikasi sudah berlangsung dengan baik.
2. Sumber daya. Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, maka kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen. Implementasi tidak akan terlaksana efektif jika terjadi sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang kurang memadai untuk mengimplementasikannya.
3. Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau (*Standard Operating Produces atau SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang begitu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Temuan Studi ini menunjukkan bahwa pengimplementasian program bantuan langsung tunai di desa urung purba belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kurang maksimalnya Sosialisasi BLT dan pemilihan penerima manfaat masih menganut sistem oligarki (kekeluargaan). Faktor penghambat pengimplementasian program bantuan langsung tunai di desa Urung Purba adalah kurang maksimalnya sosialisasi BLT dan sistem pendataan masih oligarki atau sistem kekeluargaan.



Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka berfikir adalah sebagai berikut:



**Bagan 1. Kerangka Berpikir**  
*Sumber; Diolah oleh peneliti, 2023*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif yang artinya data diambil bukan dari angka angka, melainkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data, kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dan situasi dalam kondisi tertentu (Herdiyansyah, 2014:116). Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) penelitian deskriptif adalah "penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya".

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yang paling ideal adalah penelitian deskriptif kualitatif. penelitian ini berusaha memberikan gambaran dan uraian terkait tentang Implementasi Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

### 3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Lokasi dipilih karena ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Urung Purba Kabupaten Simalungun.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Rentang waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini berkisar dua bulan, Agustus 2023 – September 2023.

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Mei	Jun	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024
1	Penyusunan Proposal									
2	Seminar Proposal									
3	Perbaikan Proposal									
4	Pengambilan Data Penelitian									
5	Penyusunan Skripsi									
6	Seminar Hasil									
7	Perbaikan Skripsi									
8	Sidang Meja Hijau									

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

### 3.3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Sumber Data Primer menurut (Sugiyono 2013:193) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Kepala Desa yang ada di Desa Urung Purba, Sekretaris Desa Urung Purba, Staff Desa Urung Purba, Kepala Dusun Urung Purba, Masyarakat penerima BLT Desa Urung Purba dan Masyarakat yang tidak Menerima BLT Desa Urung Purba.

#### a. Informan Penelitian

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun” adapun informan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Informan kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan penelitian (Sugiyono, 2019:25) yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Kepala Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun,

## 2. Informan Utama

Informan utama merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Sugiyono 2019:25) adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah merupakan Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan, dan Kepala Dusun Desa Urung Purba Kecamatan Urung Purba Kabupaten Simalungun,

## 3. Informan Tambahan

Informan Tambahan merupakan orang-orang yang benar dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi yang diteliti (Sugiyono 2019:25), dan menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima BLT.

**Tabel 3.2 Nama-nama informan penelitian**

No	Jenis Informan	Nama Informan	Keterangan
1	Informan Kunci	Bapak Halomoan Sinaga	Kepala Desa
2	Informan Utama	Bapak Mervyn Sinaga	Sekretaris Desa
		Bapak Satar G. Sinaga	Kasi Kesejahteraan
		Bapak Ben Juniarmen Lingga	Kepala Dusun
3	Informan Tambahan	Bapak Yasmin Lingga	Masyarakat Penerima BLT
		Ibu Imran Lingga	Masyarakat Penerima BLT
		Bapak Raimondo Lumban Tobing	Masyarakat penerima BLT
		Ibu Sermina Purba	Masyarakat penerima BLT
Jumlah		8 orang	

*Sumber; diolah oleh peneliti, 2023*

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, (Sugiyono 2018:456). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung

efisiensi biaya tenaga kerja. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah media dan artikel yang berkaitan dengan BLT Desa Urung Purba.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2010:193) pengumpulan data dilakukan pada kondisi sosial dalam konteks yang sesungguhnya, sehingga untuk mengumpulkan data pada kondisi alamiah tersebut dibutuhkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2013:203). Teknik observasi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010: 193), observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis tetapi yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Urung Purba Kecamatan purba Kabupaten Simalungun dengan menggunakan teori Edward III tentang implementasi kebijakan publik dan menggambarkan hal-hal yang berkaitan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013:194). Wawancara diartikan juga sebagai kegiatan untuk



mencari informasi yang akurat melalui komunikasi dua arah antara peneliti dengan narasumber yang menjadi objek dalam sebuah penelitian.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara ataupun dialog secara langsung. Wawancara akan dilakukan dengan informan yang mengetahui tentang Program Bantuan Langsung Tunai Kecamatan Urung Purba Kabupaten Simalungun adalah Bapak Halomoan Sinaga atau kepala desa, beberapa masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai dan Badan Permusyawaratan Daerah.

### 3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013:205). Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku terkait program BLT maupun dokumen seperti peraturan perundang undangan untuk memperoleh data yang nantinya akan diolah sehingga tidak berdasarkan perkiraan tetapi sudah tersedia di dalam buku maupun dokumen yang sudah ada. Dokumentasi akan dilakukan di Desa Urung Purba kecamatan Purba Kabupaten Simalungun dengan mengambil foto yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Keabsahan Data

Penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yang biasa dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu. Beragam sumber maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak (Nusa Putra 2012: 189). Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Sedangkan Hamid Darmadi (2014: 295) berpendapat bahwa triangulasi adalah keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam Penelitian ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada disebut Sugiyono (2010:330). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Penelitian ini menggunakan uji triangulasi sumber dalam keabsahan data. Dalam tahap penelitian ini teknik triangulasi ditempuh dengan cara pengecekan perbandingan dari hasil yang diperoleh saat observasi terkait dengan penelitian, wawancara, dan dokumentasi. Berharap dengan hasil perbandingan tersebut peneliti menemukan titik terang dan bisa memberi masukan kepada Perangkat Desa Urung Purba terkait program bantuan langsung tunai.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data, (Sugiyono, 2013:2017). Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis Data menurut (Miles & Huberman 1992:16) analisis terdiri dari empat alur yang terjadi secara bersamaan yaitu Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Mengenai keempat alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif (Miles & Huberman 1992:12). Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan pola nya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Miles & Huberman 1992:12). Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan sesuatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan ke dalam wawasan yang tinggi. Maka peneliti akan mengelola informasi yang didapatkan dari berbagai informan baik itu pemerintah ataupun masyarakat.

Dari hasil pemilihan info tersebut maka peneliti akan menggolongkan info mana yang perlu dan tidak perlu.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, flowchart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, secara tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Miles & Huberman 1992:12).

### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan, (Miles & Huberman 1992:12). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah penulis melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat miskin Di Desa Urung Purba Kecamatan purba Kabupaten Simalungun.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dan memberikan saran dengan Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Urung Purba, Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun;

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh pemerintah desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
  - a. Komunikasi tentang Bantuan Langsung Tunai yang terjadi di desa Urung Purba sudah terbilang cukup baik, pemerintah Desa Urung Purba mengutus perangkat desa yang terkait dengan kegiatan program ini mendatangi rumah warga satu persatu, menginformasikan bahwa tentang tata cara atau prosedur dalam program bantuan langsung tunai dan sekaligus mendata warga yang berhak menerima bantuan langsung tunai.
  - b. Sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah desa Urung purba, masih terbilang kurang dalam kualitas, dikarenakan seluruh aparatur desanya tamatan paling tinggi yaitu SMA/Sederajat. Namun dalam hal pengimplementasian program bantuan langsung tunai, meskipun dilihat dari segi tamatan perangkat desa hanya SMA/Sederajat tapi mereka mampu menjalankan dengan baik.



- c. Disposisi atau sikap para pelaksana yang ada di desa Urung Purba sudah dapat dibilang baik, dimana perangkat desa melaksanakan sesuai dengan regulasi Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 tentang cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Nagori di Kabupaten Simalungun 2020.
  - d. Struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi Desa Urung Purba telah baik. Dimana dalam penyaluran bantuan langsung tunai di desa Urung Purba telah memiliki standar operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH dan bukan penerima BPNT.
2. Faktor penghambat dalam pengimplementasian program bantuan langsung tunai yang dialami pemerintah Desa Urung Purba yaitu:
- a. Penghambat di Komunikasi, kurangnya sosialisasi dan pemahaman warga terkait BLT disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang diadakan oleh pihak desa maupun pihak pelaksana. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Kurang maksimalnya sosialisasi BLT yang terbangun di Desa ini, dimana sosialisasi terkait dengan program BLT Dana Desa di Desa Urung Purba ini hanya diberitahukan kepada Penerima BLT menggunakan metode secara manual yaitu dari mulut ke mulut.
  - b. Penghambat di struktur Birokrasi, ketidakmerataan penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Urung Purba disebabkan karena sistem pendataan masyarakat yang belum maksimal, masih adanya sistem oligarki (sistem

kekeluargaan) dan masih terdapat beberapa warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum mendapatkan haknya, karena belum terdata oleh pusat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan terhadap pengimplementasian program Bantuan Langsung Tunai di Desa Urung Purba, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Urung Purba disarankan dalam proses sosialisasi program BLT dana Desa ini pihak pemerintah Desa Urung Purba bisa memanfaatkan media sosial seperti *facebook* untuk sosialisasi terkait dengan program BLT dana Desa. Penggunaan media sosial serta pengetahuan masyarakat terkait dengan adanya dan seperti apa program bantuan langsung tunai dana desa dapat meningkatkan keberhasilan program bantuan langsung tunai ini serta dalam pendataan penerima program bantuan langsung tunai,
2. Pemerintah Desa Urung Purba dalam penyaluran bantuan bantuan langsung tunai ini, semestinya dilakukan pengambilan data melalui data penduduk miskin agar tidak terjadi sistem oligarki atau sistem kekeluargaan yang dilakukan oleh oknum terkait yang menimbulkan kecemburuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, CV*
- Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan: apa, mengapa dan Bagaimana (1)*
- Alfitri. (2012). *Community Development teori dan aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Indonesia. Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik: CV. Dharmaputera.*
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Simalungun dalam Angka. BPS Simalungun: CV Rilis Grafika.*
- Chambers, Robert. (1983). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES.*
- Darmadi, Hamid. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Sosial. Bandung: Alfabeta*
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.*
- Haughton Jonathan & Khandker Shahidur R. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat*
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.*
- Iping, B. (2020). *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Vol 11 No. 1, halaman 2*
- Kuncoro, Mudrajat. (1997). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta: UPP – AMP YKPN .*
- Miles, Mattew B. Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.*
- Moeljarto T. (1993). *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, PT. Tiara Wacana: Yogyakarta .*

- Nusa Putra. 2012. *Research & Development Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Randall B, Grace A franklin (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*
- Rachman, M.M (2018). *Metodologi Penelitian. Percetakan Ketiga:UNIPRESS*.
- Supriyatna TJahya. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP.AMP YKPN. Yogyakarta:Jarnasy.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta
- \_\_\_\_\_. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan, Kabupaten Rembang, Semarang, Jawa tengah*: Dwiputra Pustaka Jaya .
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

## Jurnal

- Alfitri, A . (2012). *Ideologi Welfare State dalam dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasiolnal , Vol 9 No 3. Halaman 4-6*
- Hasbii, I . (2008). *Implementasi Program Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus . Jurnal Administrasi Konsentrasi:Magister Administrasi Publik, halaman 17-19*
- Larasati Prayoga, M . Muchtolifah, & Sishadiyanti . (2021). *Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo*. *Jambura Economic Education Journal*. Vol 3 No . 2. Halaman 3



- Lesawengan Lisbeth. (2020). *Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur. Manado, Vol. 13 N.o. 2, halaman 2.*
- Nurwati, Nunung. (2008). *Kemiskinan Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, (Vol 10 No 1).*
- Raka, Agung., (2020). *Evaluasi kebijakan penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintahan Kabupaten Gianyar, Vol 5 No 1. Halaman 2*
- Sophan, Mochammad Kautsar. (2018). *Uji akurasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Nelayan Pesisir Pantai ,Pengaruh Kenaikan harga BBM dengan Menggunakan Metode AHP (Analitical Hierarchy Process) Madura, Vol 4 No . 2, halaman 2*
- Trifena, Anggraini., (2020). *Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan .Makassar (3)*

### Skripsi

- Ardian, Muhammad Naufal. (2021). *“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Pada Kecamatan Medan Belawan)”*
- Muhammad Hafiz. (2021). *“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau”*.
- Nafida Arumdani. (2021). *“Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojouruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”*.
- Riski Ananda. (2021). *“Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah”*.
- Winarti Wayan. (2020). *“Hasil Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Gianyar”*.
- Yogya, Tanaya Sayekti. (2021). *“Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001-2020”*.



## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dana Desa.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19

Perintah Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin

Peraturan Presiden No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

Peraturan Presiden No. 96 tahun 2015 dan keputusan Menteri Sosial RI 21/HUK/2017 tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat Subsidi beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang bantuan sosial (BANSOS)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 6 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 21 tahun 2021 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021.

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 47 Tahun 2020 tentang cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagori di Kabupaten Simalungun.

## INTERNET

<https://simalungunkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/06/59/kemiskinan-simalungun-tahun-2020.html> diakses pada 20 februari 2023

<https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Ini-Dia-6-Kriteria-Penerima-BLT-DD-Simalungun-Tahun-2022-> diakses pada 23 february 2023

<https://sid.kemendes.go.id/village-fund> diakses pada 8 maret 2023



## LAMPIRAN

### Lampiran I Pedoman Wawancara

### Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten simalungun

#### 1. Pedoman Wawancara kepada Informan Kunci

##### A. Komunikasi

1. Bagaimana cara Perangkat Desa dalam melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat? Siapa saja yang terlibat proses sosialisasi?
2. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi? Jika ada bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
3. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak penerima dalam Implementasi BLT di Desa Urung Purba?

##### B. Sumber daya

1. Berapa jumlah SDM/pegawai di Desa Urung Purba, terkait dengan program BLT? apakah sudah mencukupi?
2. Bagaimana dengan sarana sebagai penunjang kegiatan program BLT?
3. Darimana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan program BLT berasal?

##### C. Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan pemerintah daerah terhadap implementasi program BLT ini?
2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan program BLT ini?
3. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan program BLT ini?

##### D. Struktur birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi di Desa Urung Purba?
2. Bagaimana hasil adanya program BLT Desa Urung Purba?

#### 2. Pedoman Wawancara kepada Informan Utama

##### A. Komunikasi

1. Apakah komunikasi antara perangkat desa dan penerima BLT dalam mengatasi kemiskinan di Desa Urung Purba berjalan dengan baik?
2. Adakah sosialisasi sadar yang dilakukan perangkat Desa kepada para penerima BLT ini?
3. Apakah sesama perangkat Desa sepakat terhadap BLT?
4. Apakah sesama perangkat Desa berpartisipasi dalam BLT?

##### B. Sumber daya

1. Bagaimana kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan program BLT yang ada di Desa Urung Purba?
2. Adakah campur tangan pemerintah untuk melengkapi fasilitas BLT?
3. Darimana sumber anggaran pelaksanaan kebijakan program BLT berasal?
4. Apakah dengan adanya program BLT ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat?

##### C. Disposisi

1. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan program BLT Desa Urung Purba?

2. Bagaimana kesadaran dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap program BLT?
3. Apakah ada petunjuk dari atasan yang harus diikuti?
4. Apakah BLT ini harus dilaksanakan atau sesuai prioritas?

**D. Struktur Birokrasi**

1. Adakah Undang-undang khusus yang dibuat oleh pemerintah daerah tentang program BLT?

**3. Pedoman Wawancara Kepada Informan Tambahan**

**A. Komunikasi**

1. Apakah ada hal yang membuat Bapak/Ibu bersusah payah berkomunikasi dengan perangkat desa di desa Urung Purba?
2. Bagaimana komunikasi antara Bapak/Ibu dengan perangkat desa yang ada di desa Urung Purba?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa?

**B. Sumber daya**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah fasilitas yang ada di Urung Purba sudah sesuai dengan yang seharusnya?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan program BLT di desa Urung Purba sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Apakah cara atau metode penyaluran BLT sudah tepat sesuai dengan keadaan yang dilapangan?

**C. Disposisi**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu setelah terpilih menjadi penerima BLT?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan adanya program BLT?
3. Apakah ada kendala atau masalah Bapak/Ibu dalam penerimaan BLT?

**D. Struktur Birokrasi**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan peraturan program penerimaan BLT ini?



## Lampiran II Dokumentasi Lapangan



**Gambar 1. Desa Urung Purba**  
(Sumber: Dokumentasi pribadi, Tahun 2023)



**Gambar 2. Kantor Desa Urung Purba**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)





**Gambar 3. wawancara Bersama Kepala desa Urung Purba**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



**Gambar 4. wawancara Bersama Sekretaris Desa Urung Purba**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



**Gambar 5. wawancara Bersama Kaur kesejahteraan**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



**Gambar 6. wawancara Bersama Kepala Dusun**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)





**Gambar 3. wawancara bersama masyarakat penerima BLT**  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)